**ANCAMAN RESESI AKIBAT COVID-19 TERHADAP PERUSAHAAN DI INDONESIA**

Lutfi Dico Febrianto dan Dedi Rianto Rahadi

1President University , Management/Faculty of Business, Bekasi, 17550.

e-mail :lutfi.febrianto@student.president.ac.id, dedi1968@yahoo.com

Abstract

*The impact of Corona Virus Disease 19 (Covid-19) pandemic has shaken the economic of some countries and experienced a decline in economic growth. Some countries are currently experiencing a significant decline in their monthly economic activity, including Indonesia. The impact not on the country economic only, but for national and multinational companies in Indoensian which will be impact for society or individual. The signal of an economic recession is so real for Indonesia economic growth because flow of economic have been negative in Quarter III after contraction 5,32% in Quarter II of 2020. As a developing country, Indonesia economic is supported by domestic consumtion with contribution of nearly 60% of total output.*

***Keywords :*** *recession, covid-19, economic.*

Abstrak

*Dampak pandemic Covid-19 membuat perekonomian sejumlah negara terguncang dan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara kini sedang mengalami penurunan signifikan kegiatan ekonomi yang sudah berlangsung bulanan, termasuk Indonesia. Tak hanya berdampak bagi perekonomian negara, masalah resesi ekonomi tentunya sangat berdampak bagi perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia yang mana akan berdampak terhadap masyarakat. Sinyal resesi ekonomi semakin jelas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena laju perkonomian di perkirakan kembali negative pada kuartal III setelah terkontraksi 5,32 persen pada kuartal II 2020. Sebagai negara berkembang, ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi domestic dengan kontribusi nyaris 60% dari total output.*

***Kata kunci :*** *resesi, covid-19, ekonomi..*

Pendahuluan

Pada tahun 2020, penyebab utama resesi global adalah adanya pandemic Covid-19. Pandemic ini memaksa orang untuk membatasi aktivitasnya dengan tetap di rumah saja agar penularannya dapat diminimalkan.

Hal ini yang membuat berbagai aktivitas bisnis menurun yang berakibat pada merosotnya pendapatan perusahaan.

Dampak resesi bagi pekerja dimulai dari pekerja di bidang manufaktur. Hal ini di tandai dengan apakah produsen mengalami penurunan pesanan dari waktu ke waktu ataukah seperti biasa. Jika pesanan dari waktu ke waktu ataukah seperti biasa.

Jika pesanan menurun, demikian pula pekerjaan pabrik. Pabrik yang tidak berkegiatan tentu berdampak pada pekerja yang tidak dapat bekerja, sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Tanpa penghasilan tentu pekerja akan membatasi belanjanya, yang membuat aktivitas perekonomian melambat.

Penurunan permintaan konsumen biasanya merupakan penyebab di balik melambatnya pertumbuhan. Ketika penjualan menurun, bisnis berhenti berkembang. Segera setelah itu, mereka berhenti merekrut pekerja baru. Dampak resesi bagi pekerja yang utama adalah meningkatnya PHK, terlepas dari penyebabnya, ketika resesi menyebar semakin banyak bisnis membatasi kegiatan mereka atau gagal sama sekali dan memutuskan mem-PHK karyawan mereka.

Selain itu, persaingan dalam pencarian kerja juga semakin meningkat karena banyak terjadi PHK. Tenaga kerja baru yang tersedia untuk dipekerjakan segera naik, tetapi permintaan untuk mempekerjakan tenaga kerja baru oleh pelaku usaha/pelaku bisnis menurun. Dan selama resesi berlangsung pun para pekerja yang menganggur ataupun tenaga kerja baru menghadapi kesulitan dalam menemukan pekerjaan baru. Hasilnya adalah surplus tenaga kerja dari banyak jenis yang dapat bertahan selama berbulan-bulan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yaitu sebuah metode riset yang berupaya mengungkap esensi universal dari fenomena yang dialami secara personal oleh sekelompok individu (Cresswell: 1998). Data riset fenomenologis diperoleh dari berbagai hasil wawancara yang dilansir dari berbagai media, yang berfokus pada kerugian ekonomi akibat pandemik covid-19 di Indonesia dari ditemukannya kasus covid pertama di Jakarta 2 Maret 2020. Tulisan ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta dinamika hubungan fenomena yang diamati pada berbagai berita tentang covid-19 di Indonesia dampaknya terhadap ekonomi secara nasional di berbagai sektor. Data di transkrip, lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan koding, klastering, dan labeling secara tematik dan melakukan interpretasi.

Hasil dan Pembahasan

**Ancaman kerugian Nasional**

Kerugian yang paling mudah dihitung adalah kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan hanya ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh negara dalam menyusun (revisi) APBN. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 (*y-on-y*), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,56%; diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,56%. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya sebesar 0,85%.

**3,74**

**2,84**

**1,70**

**PK-P**

**PK-RT**

**PMTB**

Grafik 1. Pertumbuhan PDB beberapa komponen pengeluaran Triwulan 1-2020 (*y-on-y*) (persen)



5,07

4,97

2,76

2,71

2,97

1,56

1,65

1,41

0,56

0,66

0,85

0,85

**I-2019**

**IV-2019**

**I-2020**

PK-RT

PMTB

Lainnya PDB

Grafik 2. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran (*y-on-y*) (persen)

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran diatas dasar harga berlaku triwulan I-2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, yaitu sebesar 58,14%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,91%.

Salah satu cara menghitung dapat menggunakan acuan Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan akumulasi total produksi di sebuah negara selama setahun.

PDB per kapita Indonesia per tahun pada 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah USD 4.174,9 atau Rp 59,1 juta (kurs Rp 14.156- per USD). Dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa, maka PDB Indonesia pada 2019 adalah sebesar Rp 15.833,9 Triliun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5.3%, namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemic corona, dan sebagai kalangan memprediksikan pertumbuhan dibawah 2%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs USD (peningkatan drastis menjadi Rp 16.000 per USD pada awal april 2020), maka penulis memilih untuk mengabaikan kedua faktor tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi januari-april 2020 dan kurs USD pada masa krisis. Dan adanya pandemic covid-19 di Maret 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 melambat, menurut Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME) Bank Indonesia periode triwulan II-2020 mengindikasikan perekonomian Indonesia pada triwulan II-2020 diprakirakan terkontraksi -1,26% (yoy), turun dari 2,97% (yoy) pada triwulan I-2020. Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2020, responden memprakirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 0,03% (yoy),lebih rendah dibandingkan 5,02% (yoy) pada tahun 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh lesunya perekonomian dunia, terjadinya penurunan daya beli masyarakat, dan masih berlanjutnya penyebaran pandemic Corona Disease (COVID-19) di Indonesia. Hasil survei kinerja perekeonomian tahun 2020 tersebut sejalan dengan perkiraan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang berada di kisaran 0,9% s.d 1,9%1 dan dengan revisi asumsi makro APBN 20202 yang berada dalam di kisaran -0,4% s.d 1,0%.

Terkait dengan perkembangan harga, Bank Indonesia memprakirakan inflasi pada akhir tahun 2020 sebesar 2,51% (yoy), lebih rendah dari realisasi inlasi tahun 2019 sebesar 2,72% (yoy). Angka prakiraan tersebut berada pada revisi sasaran inflasi tahun 2020 sebesar 2,0%-4,0%2 yang dilakukan pemerintah. Responden menyatakan bahwa penurunan tekanan inflasi tersebut terutama diindikasi disebabkan oleh kecenderungan penurunan harga komoditas dunia serta adanya keyakinan harga barang dijaga oleh pemerintah. Adapun dalam aspek nilai tukar, triwulan II-2020 memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2020 akan melemah hingga Rp 14.395 per USD dibandingkan realisasi aakhir tahun 2019 sebesar Rp 13.901 per USD. Responden memprakirakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terebut dipengaruhi oleh faktor kondisi perekonomian global maupun regional tahun 2020 serta menurunnya perekonomian Indonesia. Prakiraan nilai tukar tahun 2020 tersebut berada di bawah kisaran revisi kedua asumsi makro dalam APBN 2020 yang berada dalam

rentang Rp 14.900 s.d 15.500 per USD.

Jadi berapa kerugian ekonomi nasional akibat pandemic Covid-19? Ada 2 pilihan dalam menghitung kerugian. Cara pertama menggunakan asumsi perputaran uang di Jabodetabek sebesar 70% dari total uang beredar di Indonesia. Apabila ini diartikan 70% PDB Indonesia dipengaruhi pergerakan ekonomi di Jabodetabek, maka penghentian aktivitas secara total di Jabodetabek selama 1 bulan akan menimbulkan kerugian nasional sebesar = 1/12 X 70% X Rp 15.833 Triliun = Rp 923 Triliun. Namun apabila penghentian itu tidak total karena masih ada beberapa jenis kegiatan yang tidak dilarang beroperasi, seperti sector kesehatan, makanan pokok, industry strategis, dsb, kerugian akan lebih kecil. Bila angka aktivitas berkisar 10%, maka kerugian akan menjadi 90% X Rp 923 Triliun atau sekitar Rp 830 Triliun. Apabila PSBB Jabodetabek diperpanjang 2 pekan, maka kerugian nasional akan mencapai 1,5 X Rp 830 Triliun = Rp 1.260 Triliun atau setengah dari anggaran belanja negara pada APBN 2020.

Cara kedua adalah dengan menggunakan perbandingan proporsi PDRB dari kawasan yang memberlakukan pembatasan sosial. PDRB Jabodetabek secara akumulasi adalah sebesar 24,83% X Rp15.833 Triliun X 90% = Rp 294,85 Triliun. Apabila diperpanjang 2 pekan, kerugian akan menjadi sekitar Rp 4442,3 Triliun.

Adapun perhitungan kedua, menggunakan proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PDB juga dapat diterima, mengingat data itu merupakan gambaran riil aktivitas ekonomi pada kurun pencatatan. Dan metode ini juga akan memudahkan penghitungan apabila semakin banyak daerah-daerah yang menerapkan PSBB, dan dalam rentang waktu yang berbeda.

**Ancaman kerugian Individual dan *Corporate* (per pelaku bisnis)**

Dari semua perhitungann kerugian di atas, implementasi akhirnya berada pada ranah individu dan entitas usaha. Negara mengalami kerugian karena pendapatan anjlok khususnya dari pajak, sedangkan belanja melonjak karena harus mengatasi kondisi darurat, menyediakan jaring pengaman sosial, mengatasi penderita sakit, pengerahan aparat dan tenaga kesehatan ekstra, membayar bunga untuk utang baru, dll. Namun kerugian itu nanti akan dikompensasi pada pendapatan (pajak atau non-pajak) berikutnya, sehingga pada dasarnya negara akan impas alias tidak rugi, kecuali apabila dalam pelaksanaan ada kebocoran atau korupsi terhadap asset negara. Adapun secara umum bentuk nyata kerugian itu antara lain berupa :

Bagi entitas usaha :

1. Hilangnya pendapatan karena tidak ada penjualan, namun, pengeluaran tetap terjadi meski tidak sepenuhnya. Kerugian riil akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan. Di anara pengeluaran yang relatif tetapadalah sewa tempat beserta biaya rutin yang menyertainya, gaji staf yang tidak mungkin di-PHK Karena berbagai alasan, pengamanan, pembayaran kepada supplier yang tidak bias lagi ditunda, dll.
2. Lapangan usaha menerapkan PHK hingga penundaan tenaga kerja baru. Pelaku usaha makro mengambil langah ini supaya bisa terus bertahan di masa pandemic ini dimana masa pandemic adalah masa yang sulit terhadap produktifitas perusahaan. Kementerian ketenagakerjaan sudah mencatat sampai tanggal 1 mei 2020 terdapat sekitar 375 ribu pegawai yang terkena kebijakan PHK pada sektor formal. Selain itu terdapat 1 juta pegawai yang dirumahkan karena pandemi ini. Pada sector informal, sebanya 314 ribu pegawai terkena imbas dari pandemic. Total jumlah pegawai yang terkena dampak Covid-19 adalah 1,7 juta orang. Data ini didapatkan dari sumber yang terpercaya dan jelas, dilengkapi nama dan NIK. Data tersebut menunjukkan kalua perusahaan akan melakukan berbagai cara agar usaha mereka terus berjalan dengan baik, Kemnaker mengatakan kalua PHK dan peniadaan lembur sampai pengurangan jam kerja perlu dilakukan.
3. Banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan penundaan rekrutmen hingga waktu yang tidak ditentukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Penundaan rekrutmen waktu yang tidak ditentukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan. Penundaan rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan sampai hingga 26,52% atau sekitar 580 perusahaan yang melakukan rekrutmen sebelum pandemi terjadi tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 480 perusahaan. Sebelum pandemi terjadi sekitar 25% perusahaan merekrut jumlah pegawai baru yang cukup banyak. Sedangkan sekarang hanya 11% perusahaan yangmasih merekrut dengan jumlah yang sama atau lainnya mengurangi jumlah orang.data ini mengartikan kalau banyak perusahaan yang memang masih membuka perekrutan pegawai tapi jumlahnya terbilang sedikit karena ingin menjaga perusahaan akan bias berjalan.langkah ini dilihat sebagai strategi yang cukup baik, mengingat pelaku usaha makro masih perlu berusaha untuk tetap berjalan setelah pandemi telah usai.
4. Perusahaan hanya rekrut pekerja produktivitas tinggi dan multitasking yang mana memiliki produktivitas yang tinggi juga melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Pandemi ini dikatakan bisa menjadi peluang bagi pengusaha untuk berpindah haluan dari padat karya menjadi padat modal.
5. Pelaku usaha lebih memillih outsourcing karena fleksibilitasnya dalam hubungan ketenagakerjaan. Fleksibilitas ini dilihat sebagaia keuntungan karena dunia usaha yang saat ini sangat dinamis. Namun hal ini juga perlu diimbangi dengan perlindungan tenaga kerja yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.
6. Perusahaan banyak yang tutup permanen, beberapa perusahaan memperkirakan hanya bisa bertahan untuk beberapa bulan saja. Dilihat dari akibat ini, perusahaan mendapat kerugian yang lebih besar dibanding dengan pekerja.
7. Jalannya perusahaan terganggu karena mereka tidak bisa melakukan produksi akibat dari karyawan yang tidak ada di tempat kerja dan kurangnya bahan baku menjadi alasan, karena banyak perusahaan yang mengandalkan Cina sebgai sumber bahan utama bahan baku mereka. Sedangkan Covid-19 berasal dari Cina, yang mana menyebabkan banyak pelabuhan yang ditutup sehingga mereka tidak bisa melakukan ekspor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menjadi alasan selanjutnya dimana perusahaan tidak bisa menaikkan harga.

Bagi Individu :

1. Hilangnya gaji dan atau tunjangan selama masa krisis, atau hilangnya pemasukan bagi pelaku usaha/profesi profesi informal.
2. Danda akibat telat atau tidak bayar kewajiban (missal cicilan,kredit, utang, jatuh tempo, dsb). Dan kerugian immateri apabila halite mengakibatkan performa ketaatan bayar menjadi buruk dalam catatan Bank Indonesia.
3. Pengeluaran ekstra bagi anggota keluarga dalam kondisi darurat.
4. Bunga utang baru apabila menggunakan.
5. Kerugian tak ternilai apabila krisis itu mengakibatkan hilangnya pekerjaan.
6. Tidak naiknya UMP akibat kondisi ekonomi dalam masa pemulihan. Secara tidak langsung hal ini berimbas kepada buruh atau individu non aparatur sipil.

**Potensi Kerugian Lainnya**

Selain kerugian-kerugian yang dapat dikalkulasi di atas, masih ada potensi kerugian lain yang dapat terjadi akibat faktor non-bisnis. Kesulitan ekonomi telah mengakibatkan peningkatan tindak kejahatan dan perusakan fasilitas usaha. Lebih dari 30 ribu narapidana telah dibebaskan akibat kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang penuh sesak ([www.kompas.tv](http://www.kompas.tv), 01/04/20). Para narapidana mengalami kekagetan ekonomi dan sebagian diantaranya telah terbukti melakukan tindak kejahatan hanya beberapa hari saja setelah bebas. Selain tindak kejahatan, potensi chaos, anarkisme, ataupun vandalisme akibat krisis ekonomi juga dapat terjadi. Situasi kekacauan massal itu dapat mengakibatkan kerugian tak terduga seperti perusakan property, kehancuran kendaraan, kerusakan fasilitas umum dan wisata, juga dapat merembet ke penjarahan massal terhadap toko-toko atau pabrik, atau bahkan juga mengorbankan nyawa atau kehormatan manusia. Faktor ini akan timbul jika pembatasan berlaku berkepanjangan hingga krisis memuncak atau sulit dikendalikan.

**Menyiasati Kerugian Akibat Ancama Resesi**

Bagi pelaku bisnis yang sempat melakukan diversivikasi lintas sectoral dengan jenis bisnis yang berada pada kutub berbeda, berkemungkinan untuk selamat dari krisis. Bagi bisnis skala besar, biasanya telah terjadi konglomerasi lintas sectoral, sehingga bisa dilakukan subsidi silang antar entitas bisnis grup. Secara keseluruhan mungkin pelaku bisnis mengalami kerugian, namun masih bisa terselamatkan melalui bisnis di sektor lainnya. Bagi usaha yang memiliki dana cash juga dapat menyiasati kerugian, yakni dengan membeli asset atau bisnis yang murah, namu apabila digunakan untuk mendapatkan asset yang lebih baik, maka dapat saja menghasilkan keuntungan.

Setelah krisis berakhir, asset tersebut dapat berproduksi denga baik atau bahkan dapat dijual dengan nilai yang jauh lebih mahal. Bagaimana bila diversivikasi maupun upaya lain tidak dapat dilakukan untuk mengurangi kerugian? Akhirnya secara umum akan ditempuh langkah yang sama, yaitu penghematan. Semua kalangan akan berusaha mengurangi pengeluaran sebisa mungkin, dan berusaha bertahan selama mungkin. Apabila masih tidak mencukupi, akan melakukan langkah berikutnya yaitu mencari pinjaman. Setelah itu mencari cara untuk mendapatkan pemasukan baru.

Langkah-langkah penghematan, pencairan, pinjaman, dan upaya mendapatkan pemasukan baru, merupakan langkah umum untuk service. Survival pada saat krisis ini diangap sangat penting, sebagai modal untuk mencari pengganti kerugian pasca krisis. Karena, apabila tidak dapat bertahan, dan collaps sebelum krisis berakhir, maka seluruh potensi pengembalian kerugian akan hilang. Apabila seluruh individu, entitas usaha, organisasi-organisasi non- bisnis, dan smeua bagian dari sebuah negara dapat melewati masa krisis, tetap survive dan kembali berproduksi, pada akhirnyakerugian nasional maupun sektoral akan tertutupi. Maka dari itu pelaku usaha kembali mampu membayar pajak, bahkan mungkin lebih banyak, dan akan menyerap tenaga kerja baru sehingga meningkatkan pendapatan individu yan gmana akan meningkatkan pendapatan negara dan mendongkrak PDB.

Dalam hal ini juga dibutuhkan peran pemerintah untuk menyiasati kerugian dari ancaman resesi, yaitu pemerintah perlu meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diperlukan pula peningkatan efisiensi dan daya saing iklim usaha nasional untuk menarik arus modal baru yang diperlukan oleh sektor riil. Pemerintah dapat focus pada pencairan stimulus kepada masyarakat dan pelaku usaha, dengan demikian kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi meningkat. Pemerintah juga perlu memberi kemudahan untuk pelaku usaha untuk mendorong ekspansi bisnis seperti izin ekspor maupun bantuan restrukturisasi modal. Tak hanya itu, bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga perlu diperhatikan. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar pelaku usaha bertahan, pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI dan OJK dengan perbankan Nasional, untuk berbagai sektor bisnis, sektor usaha, sektor rill tetap bisa bertahan.

KESIMPULAN

Dari uraiaan diatas dapat disimpulkan, bahwa kunci dari penyehatan kembali kondisi ekonomi nasional adalah survival di tingkat individu dan entitas usaha. Maka dari itu negara harus mengerahkan segenap upaya, termasuk dengan memberikan stimulus, agar rakyatnya tidak collaps semasa krisis, tetap produktif dan memiliki penghasilan memadai, serta bisnis dapat terus berjalan. Dan yang diperlukan adalah kebijakan ang tepat, baik secara lokasi, waktu, maupun prosedurnya. Apabila PSBB dapat menjamin putusnya rantai penularan Covid-19, maka lakukanlah dengan waktu sesingkat-singkatnya, pembatasan yang berkepanjangan beresiko melampaui batas kemampuan survival individu maupun entitas bisnis. Dan bila itu terjadi, maka penyelamatan tidak dapat dilakukan, dan kerugian akan semakin besar baik secara ekonomi maupun sosial.

Daftar Pustaka

1. Hadiwardoyo, Wibowo. 2020. Kerugian Ekonomi Nasional Akibat COVID-19. Jakarta: Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Thebalance.com, 2020. What is a recession. <https://www.thebalance.com/what-is-a-recession>. [Online] Tersedia: [25 Juli 2020].
3. Indonesia, Bank. 2020. Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi. Jakarta: Bank Indonesia
4. Idxchannel, 2020. Jika terjadi resesi ekonomi apa dampak bagi masyarakat. <https://www.idxchannel.com/market-news/foto/jika-terjadi-resesi-ekonomi-apa-dampak-bagi-masyarakat>. [Online] Tersedia: [27 Oktober 2020].
5. Glints.com, 2020. Jika Terjadi Resesi, Apa Dampak bagi Pekerja. <https://glints.com/id/lowongan/dampak-resesi-bagi-pekerja/#.X5ro2Fgza03>. [Online] Tersedia: [4 Agustus 2020].
6. Kompas.com, 2020. Alasan Pemerintah Tolak Kenaikan Upah. <https://money.kompas.com/read/2020/10/27/103852526/alasan-pemerintah-tolak-kenaikan-upah-minimum-tahun-depan?page=all>. [Online] Tersedia: [27 Oktober 2020].
7. Bps.com, 2020. Pertumbuhan Ekonomi Indoneia Triwulan I-2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>. [Online] Tersedia: [5 Mei 2020].
8. Katadata.co.id, 2020. Wabah PHK Akibat Covid-19. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a66d0e897f/wabah-phk-akibat-covid-19>. [Online] Tersedia: [18 April 2020].
9. Thebalance.com, 2020. What is real GDP how to calculate vs nominal.

<https://www.thebalance.com/what-is-real-gdp-how-to-calculate-it-vs-nominal-3306040>. [Online] Tersedia: [29 Juni 2020].